

PROJECT

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RAPAT PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PESAWARAN

NAMA
TEDI YOPIYADI

DOSEN
Dr. SUTEDI, S.Kom., M.T.I



PROGRAM STUDI S2 MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA

INSTITUS INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA
LAMPUNG 2024

DESKRIPSI INSTANSI



Pada tahun 2022, terjadi perubahan nomenklatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Pesawaran. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pesawaran merupakan dinas Tipe A

VISI

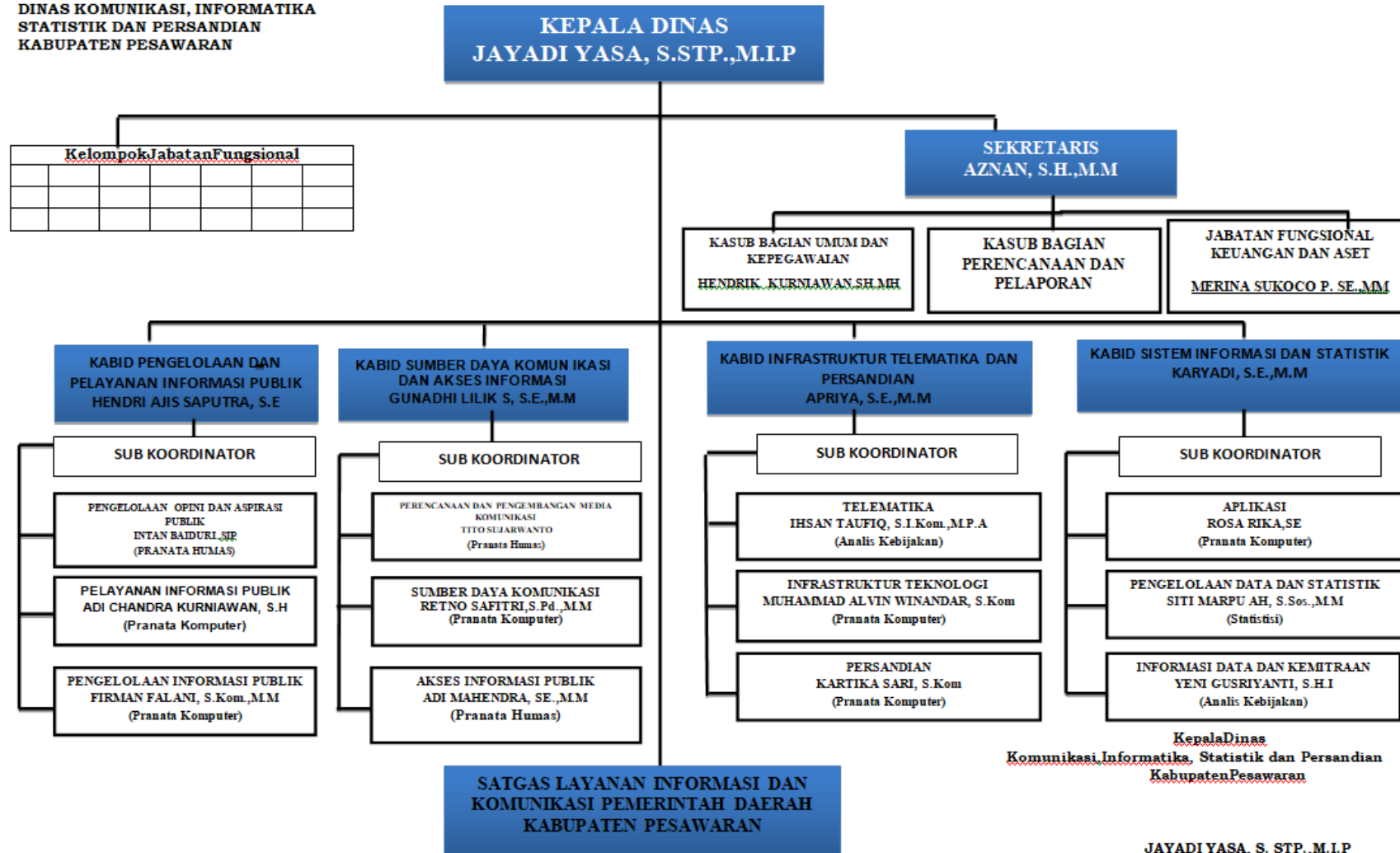
“Pelayanan adalah Utama”.

MISI

- ❖ Meningkatkan kualitas dan profesionalitas petugas pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
- ❖ Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
- ❖ Mengembangkan pelayanan informasi yang akurat dan berimbang

STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PESAWARAN



Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Pesawaran

JAYADI YASA, S. STP., M.I.P
NIP. 19830113 200112 1 002

LATAR BELAKANG

Perpres No. 95 tahun 2018 tentang SPBE

Memodernisasi sektor pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi

Sistem manajemen rapat belum digital

sehingga memiliki kendala dalam proses inventarisasi data hasil rapat. Data hasil rapat masih di simpan di odner

Notulen rapat masih tulis tangan

Notulen hasil rapat masih ditulis tangan kemudian baru dipindahkan ke laptop untuk di print

Absensi sering hilang

karena Absensi rapat masih ditulis dikertas dan ditanda tangani sehingga sering menyebabkan absensi hilang



STUDI KELAYAKAN SISTEM

Kelayakan Teknis

Untuk dari segi teknis, persiapan sistem bisa dijalankan karena baik itu server dan tenaga ahli sudah ada. Server sudah disediakan dari kemkominfo yaitu PDN sedangkan tenaga ahli sudah punya 2 programmer

Kelayakan Operasional

Untuk sistem sudah pasti bisa dipakai untuk dinas, yang mana sistem manajemen rapat pada dinas masih belum digital

Kelayakan Ekonomis

Karena server dan tenaga ahli sudah tersedia, ini akan mengurangi biaya dari segi ekonomi

Kelayakan Jadwal

Permasalahan hanya pada waktu pelaksanaan, kemungkinan pelaksanaan akan sampai pada tahap desain

Kelayakan Hukum

Dari segi hukum bahwa diketahui menurut Perpres 95 tahun 2018 bahwa harus dilakukan modernisasi sistem dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga dari segi hukum tidak ada masalah



ANALISIS PROSES BISNIS EXISTING SYSTEM

Berikut Analisis Proses Bisnis Existing System :

Bidang yang akan mengadakan rapat akan mengajukan rapat ke bagian umum dinas bisa melalui whatsapp atau datang langsung ke bagian umum dengan form, kemudian bagian umum dinas akan memberikan informasi rapat melalui grup whatsapp dinas. Informasi berisi judul rapat, waktu, lokasi dan peserta yang diundang rapat.

Bagian umum atau bidang yang akan mengadakan rapat membuat form absensi kehadiran rapat sesuai dengan judul rapat, lalu dicetak untuk nanti ditanda tangan peserta rapat.

Bidang yang mengadakan rapat akan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk rapat.

Saat rapat akan dimulai, peserta rapat diwajibkan mengisi absensi rapat terlebih dahulu.

Ketika rapat dimulai, notulis bertugas untuk membuat notulen rapat, notulen rapat berisi tanggal rapat, waktu rapat, tempat rapat, pimpinan rapat, peserta rapat sekaligus isi pembahasan rapat. Pencatatan notulen rapat ditulis dikertas kosong.

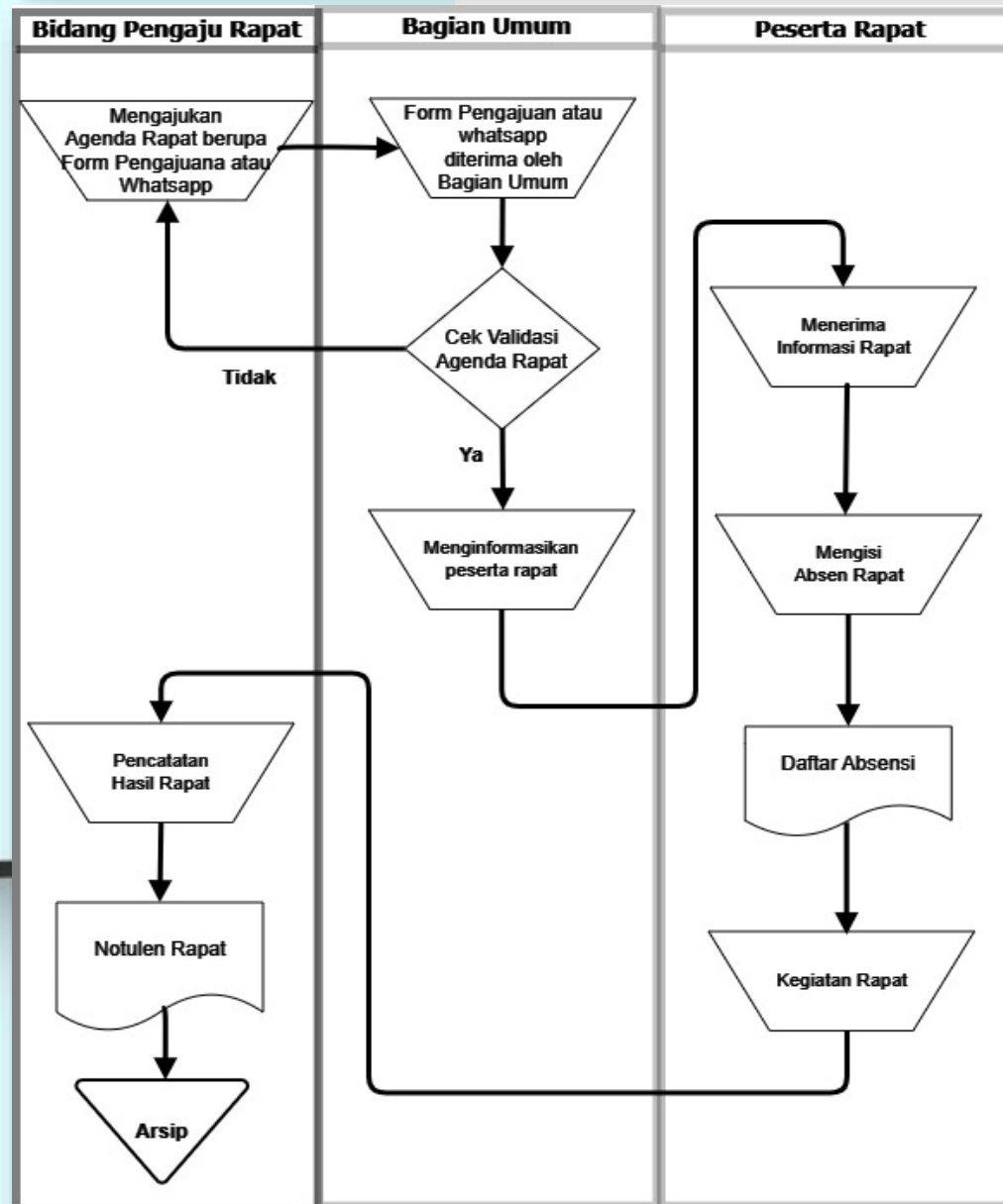
Setelah rapat selesai, notulis akan memindahkan notulen rapat ke dalam word kemudian dirapikan dengan ditambah kop dinas sekaligus tanda tangan untuk pimpinan rapat.

Notulen rapat akan diserahkan kepada pimpinan rapat untuk disetujui dan ditandatangani.

Absensi kehadiran rapat, notulen rapat dan bahan rapat akan disimpan oleh bidang yang mengadakan rapat.

ANALISIS PROSES BISNIS EXISTING SYSTEM

MODEL PROSES BISNIS EXISTING SYSTEM



ANALISIS KELEMAHAN SISTEM

METODE PIECES

Performances (Kinerja)

Sistem Lama

Pengajuan agenda, absensi dan notulen masih dilakukan dengan tulis tangan sehingga hal ini menjadi kurang efektif dan sering menyebabkan kehilangan data hasil rapat

Sistem Baru

Pengajuan agenda, absensi dan notulen rapat semua akan dilakukan oleh sistem sehingga membuat rapat menjadi efektif dan data hasil rapat akan tersimpan di sistem

Information (Informasi)

Sistem Lama

Peserta rapat tidak langsung akan mendapatkan informasi notulen rapat karena notulen rapat harus dipindahkan dulu ke word baru kemudian diprint dan ditandatangani ketua rapat lalu baru dibagikan ke peserta rapat

Sistem Baru

Sistem ini akan menyediakan halaman untuk notulis mencatat hasil rapat sehingga saat rapat selesai. Hasil rapat akan dikirimkan secara otomatis ke ketua rapat untuk disetujui. Setelah disetujui hasil rapat akan langsung terkirim ke peserta rapat

Economic (Ekonomi)

Sistem Lama

Biaya yang digunakan untuk membeli pena, kertas dan lain-lain akan dilakukan berulang selama barang habis terpakai

Sistem Baru

Dengan memanfaatkan server PDN dari kemkominfo dan Tenaga Ahli yang ada sehingga tidak perlu lagi mencari jasa pembuatan website. Sehingga dengan adanya website sistem informasi rapat dapat mengurangi biaya rapat seperti pembelian pena, kertas dan lain-lain

Control (Pengendalian)

Sistem Lama

Bagian umum akan kesulitan dalam melakukan validasi agenda rapat pada saat bidang mengajukan agenda rapat karena bagian umum memiliki banyak pekerjaan lain dan bisa jadi bagian umum akan lupa bahwa ada pengajuan agenda rapat

Sistem Baru

Pengajuan bisa dilakukan dari sistem dan bidang juga bisa mengajukan sendiri agenda rapat sehingga tidak perlu lagi dari bagian umum. Begitu juga dengan pemilihan peserta rapat, notulen dan lain-lain bisa dilakukan dari sistem.

Efficiency (Efisiensi)

Sistem Lama

Pengajuan agenda rapat yang masih dilakukan secara manual yaitu dengan membuat form sehingga membuat sistem kurane efisien apalagi saat staf bagian umum tidak ada ditempat sehingga akan memakan waktu karena menunggu staf bagian umum

Sistem Baru

Karena pengajuan rapat bisa dilakukan lewat sistem dan bidang bisa mengajukan rapat sendiri sehingga membuat rapat menjadi efisien

Service (Pelayanan)

Sistem Lama

Pelayanan yang dilakukan sistem masih kurang efektif karena bidang yang melakukan rapat masih harus menyiapkan terlebih dahulu seperti persiapan kertas notulen untuk ditulis dan persiapan absen untuk peserta rapat

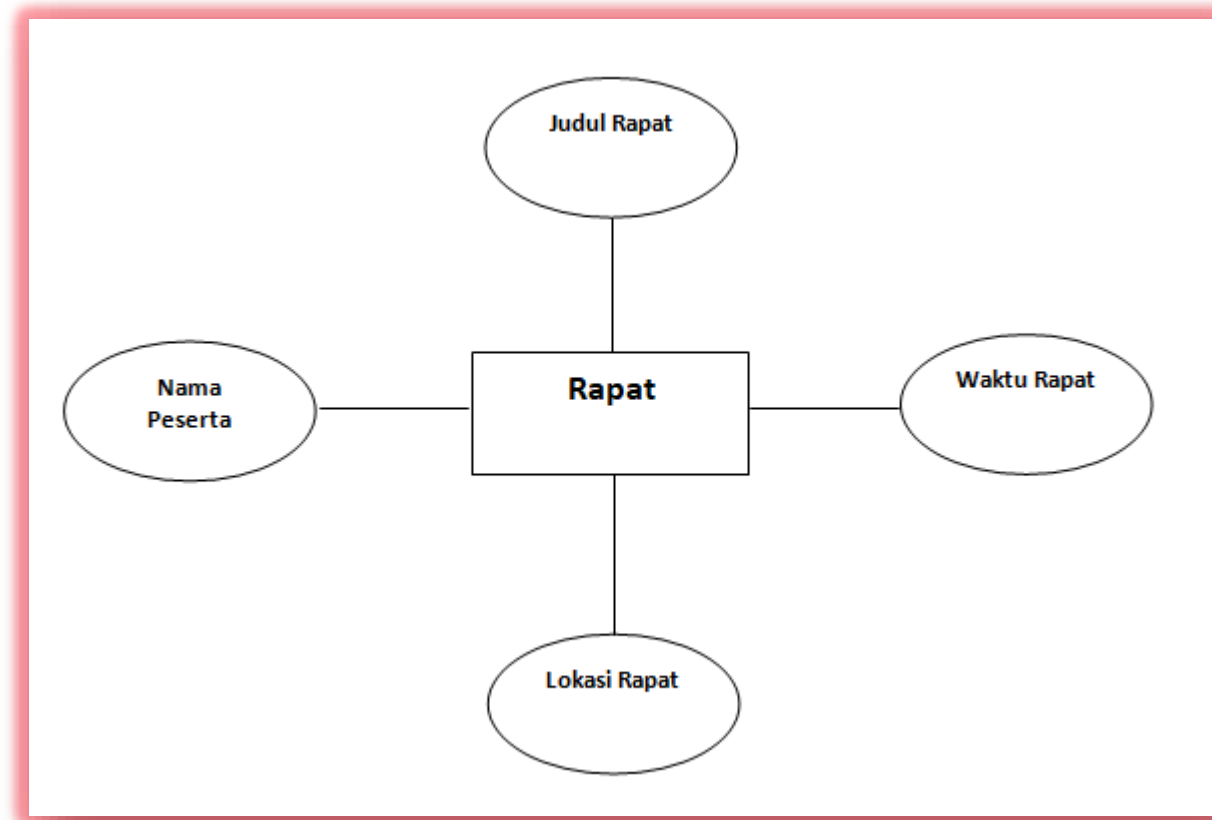
Sistem Baru

Pada sistem yang baru, absensi rapat sudah disiapkan sehingga peserta tinggal login untuk absen rapat dan halaman notulis untuk mencatat hasil rapat juga sudah disediakan

DOKUMEN I/O

INPUT

INFORMASI RAPAT



DOKUMEN I/O

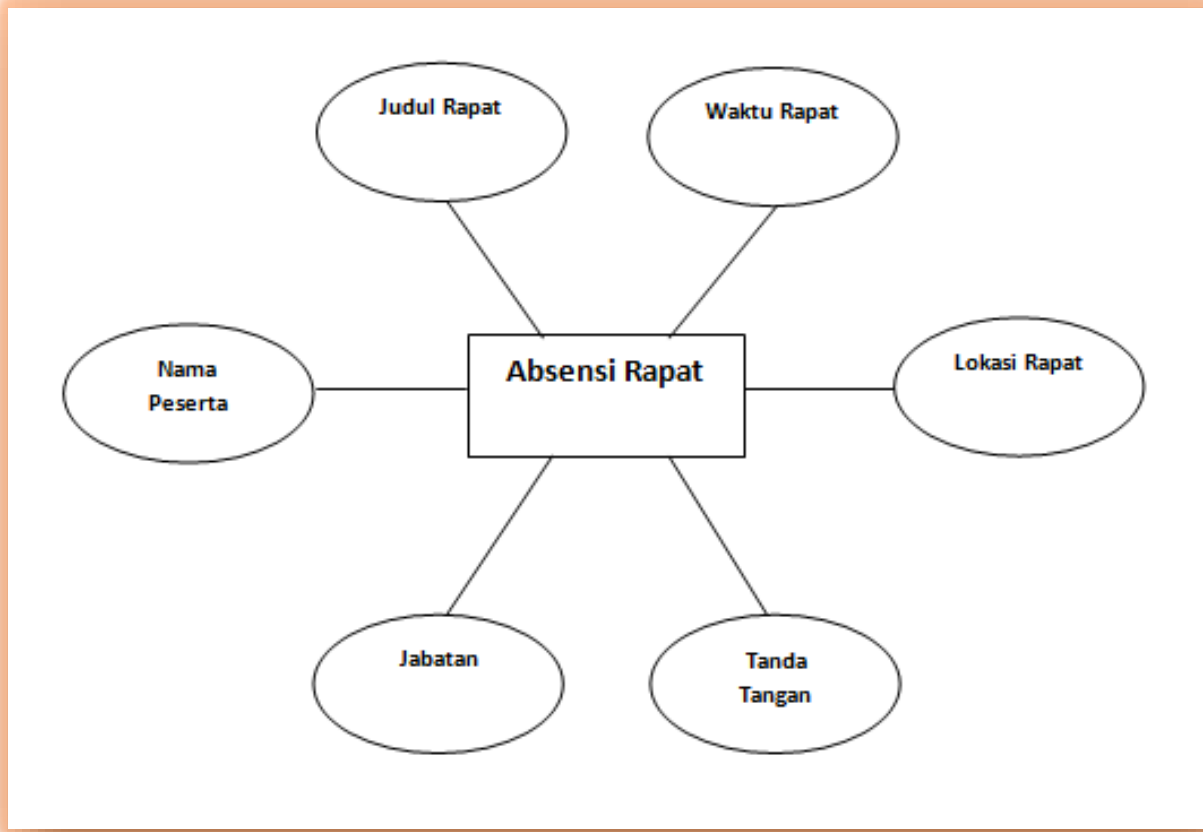
ABSENSI RAPAT

Entity Relationship Diagram (ERD)

DAFTAR HADIR RAPAT FINALISASI RANCANGAN PERBUAT DATA INDONESIA KAB. PESAWARAN

Hari/Tanggal : 07 Juli 2022
Tempat : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Syaiful Yasa	Kadis Kominfo	
2	ARIEF BUDIMAN	Bag. Perencanaan	
3	WALIWITA USMAN	Bag. Organisasi	
4	Erdi Sularta	Dir. IT	
5	PERA FITRIANI	Substansi Pda BPS Pesawaran	
6	HENDI WIDYANINGRAT	STAF PDA BPS Pesawaran	
7	Oli Hastuti	Bappeda Pesawaran	
8	ERMA SUWITIG	Bappeda Pesawaran	
9	Eryhan Jaya	Bappeda Pesawaran	
10	Risa Rika	Kominfo	
11	Mahesa Darmasutra	Kominfo	
12	Fadila Eka Nopata	Kominfo	
13	Wulan Desyuningrati	Kominfo	
14	Nawang Inom Supriatna	Kominfo	
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			



DOKUMEN I/O

OUTPUT

NOTULEN RAPAT

NOTULEN

Sidang Rapat : Finalisasi Rancangan Perleb Satu Data Indonesia Kab. Pesawaran
Hari Tanggal : Kamis 07 Juli 2022
Waktu Pengajian : 09.30 – 12.00 WIB
Waktu Sidang Rapat : 02.30 WIB
Acara : 1. Pembukaan
2. Pengantar Kepala Dinas Komunikasi Pesawaran
3. Pemaparan Pembukaan
4. Penyampaian Tanggapan dan Usulan/Saran
5. Penutup

Pemimpin Sidang Rapat

Ketua : Jayadi Yasa
Sekretaris : Karyadi
Pencatat : Wulan Desyaningih

Peserta Sidang Rapat

1. Ihsan Taufiq
2. Asri Kusuman
3. Han Wita Usman
4. Edo Sidiarta
5. Rizka Fidiyani
6. Herida Widayanta
7. Ota Harahap
8. Cema Juwita
9. Evhan Jaya

Kegiatan Sidang Rapat

1. Pembukaan yang dilaku oleh Bapak Karyadi
2. Pengantar yang disampaikan oleh Bapak Jayadi Yasa,
- Bupat sangat khusni terkait dengan data
- Percepat regulasi mengenai satu data sebagai dasar untuk
kubupaten pesawaran bertransformasi
- Pembentukan Forum Satu Data
3. Pemaparan "Diskusi Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu
Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pesawaran" oleh Bapak Ihsan
Taufiq
4. Penyampaian Tanggapan dan Usulan/Saran:

- 1) Ibu Risa (BPS)
 - Validasi Pendukung tap PD wajib ada untuk validasi data dari produsen data yang memilikin dan PD tersebut dan dapat dipertanggung jawabkan
- 2) Ibu Herida (BPS)
 - BPS dengan OPD lain sama-sama menghasilkan data. BPS menghasilkan data statistik, sekalian hanya untuk publikasi berupa angka
 - OPD menghasilkan data statistik, sekalian hanya untuk publikasi berupa angka
- 3) Ibu ChlEma (Bappeda)
 - Forum Komunikasi benar-benar satu wadah koordinir bukan fungsi (Koordinator Bappeda)
 - Untuk melaksanakan tugasnya koordinator dibantu oleh Sekretaris Satu Data
 - Fungsi Koordinator Penyelenggara
- 4) Bapak Evhan (Bappeda)
 - Peminda Data Statistik sudah oleh BPS
 - Dibuat oleh kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan BPS terkait dengan pemanfaatan data statistik untuk pembangunan daerah supaya lebih kuat

- Peminda Data Geospasial masih harus Dappred atau Perencanaan Umum?
- Data yang dimiliki Bappeda digunakan untuk perencanaan

5) Bapak Karyadi (Kominfeksan)

- Validasi Pendukung sebagai filter utama dari produsen data
- Forum Satu Data tempat tertinggi untuk membahas apa yang mau diujikan, seperti daftar kebutuhan data, bagaimana verifikasi data?
- Sekretariat Satu Data hal-hal yang dibicarakan terkait dengan administrasi, bagaimana forum satu data bisa berjalan? Siapa yang membatasi laporan melalui rapat?
- Sekretariat Satu Data wajib supaya Forum Satu Data bisa hidup
- Bupat minta ringgapan Perleb jdi, dan laporan Bappeda mau untuk proses dimana?
- Validasi Pendukung harus dipisah
- Perlu peran bagian organisasi untuk kerinci ketika beberapa OPD punya data yang sama tapi berbeda. Siapa yang akan memuliskan secara sah siapa yang berhak atas data tersebut?
- Ada kemungkinan Bappeda membuat daftar kebutuhan data prioritas Kabupaten Pesawaran, salah satunya bisa dihasilkan lewat forum

6) Bapak Eri (KIRFI)

- Pembina Geospasial ketentuannya OPD/SKPD yang menjalankan urusan tata ruang
- Validasi Pendukung sebagai ex officio sekretaris
- Sampai sekarang di Sidang kita masih banyak data yang tidak valid. Contoh ada Data Rumah tetapi Monevnya tidak jitu
- Lebih cenderung jika di OPD/SKPD tidak ada pejabat yang menangani urusan data atau informasi lebih baik diserahkan ke Sekretariat

7) Bapak Hani (Bagian Organisasi)

- Sudah mulai memikirkan kebijakan Satu Data
- Kalau buat satu kebijakan pasang saja di urusan, karena dalam urusan sudah jitu
- Berdasarkan Perda yang melaksanakan urusan statistik yaitu Dekominfoeksan
- Produsen Data utama dari Bappeda, perencanaan awal berupa data yang didapat dari seluruh urusan.

8) Bapak Ihsan (Kominfeksan)

- Mendiskusikan UU 23, Data Geospasial sudah di Dinas Pekerjaan Umum
- Memili Orang yang bekerja atau OPD yang ditugaskan?
- Data produksinya semua dasarnya harus sesuai dari sasaran kinerja (RPJW)
- Kontrol data di Sekretariat, karena sebagai pengendali mempunyai laporan tap badan. Kenapa butuhnya? karena harus ada laporan tap Timulan

9) Bapak Ihsan (Kominfeksan)

- BPS seharusnya menjadi sumber data bukan sebagai output data
- Bagaimana caranya data menjadi satu ruang? siapa yang data tidak keluar dari forum?
- Perkuat Perpres 39 Tahun 2019 Pasal 27 Ayat 4
- Ketika RPJM sudah direvisi dan disahkan oleh Provinsi artinya sudah sesuai dengan kebijakan Nasional
- Paling utama sekali jika Forum Satu Data ini mau jalan Bappeda pastikan dulu semua OPD menyelesaikan Renstra, karena di dalam Renstra terdapat kewajiban melakukan pengkolektif data. Jika tidak bisa sendiri, jadikan satu tim untuk menggarap memperbaiki RPJM.

1. Kata Pembukaan

2. Pembahasan

1. Prinsip SDI: Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, Kode Referensi Data, Kode
2. Penyelenggaraan SDI Tingkat Kabupaten: Pembina Data Tingkat Kabupaten, Koordinator Tingkat Kabupaten, Pembina Pembina, Produser Data Tingkat Kabupaten
- Pembina Data Geospasial?
- Validasi Pendukung Kabupaten PD yang menyelenggarakan urusan statistik?
- Validasi Pendukung: Ex Officio Sekretaris PD Sekeloa jadi PPD Pembina. Tugasnya apa saja?
Contoh: Salafita PPD Pembantu di PD, Surabaya & Sumerding WIP Teknis atau Data Custodian, WIP Verifikasi Himpun BDU, WIP Validator Konten = Produser Data

3. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten & Sekretariat SDI Kabupaten (Berifat ex officio)
4. Penyelenggaraan SDI, Transparansi, Pengumpulan, Pemeriksaan, Penyebarluasan (Portal SDI?)
5. Pembatasan Akses Data: Wicicita ke PD, IPID ke non PD
6. Pendanaan: Segala pendanaan yang diperlukan untuk Peraturan Bupati dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. Renc 2021 Pembentukan Tim Forum Satu Data bagian:

- Koordinator
- Pembina Data
- Validasi Pendukung?
- Kepala Sekretariat
- Anggota

3. Penutupan

1. Perpres 39 Tahun 2019 Pasal 21 Ayat 3
2. Perpres 39 Tahun 2019 Pasal 21 Ayat 5
3. Perpres 39 Tahun 2019 Pasal 22 Ayat 2
4. Perpres 39 Tahun 2019 Pasal 24 Ayat 5
5. Perpres 39 Tahun 2019 Pasal 26 Ayat 2
6. Perpres 39 Tahun 2019 Pasal 27 Ayat 4
7. UU 23 Tahun 2014
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik dalam Mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia

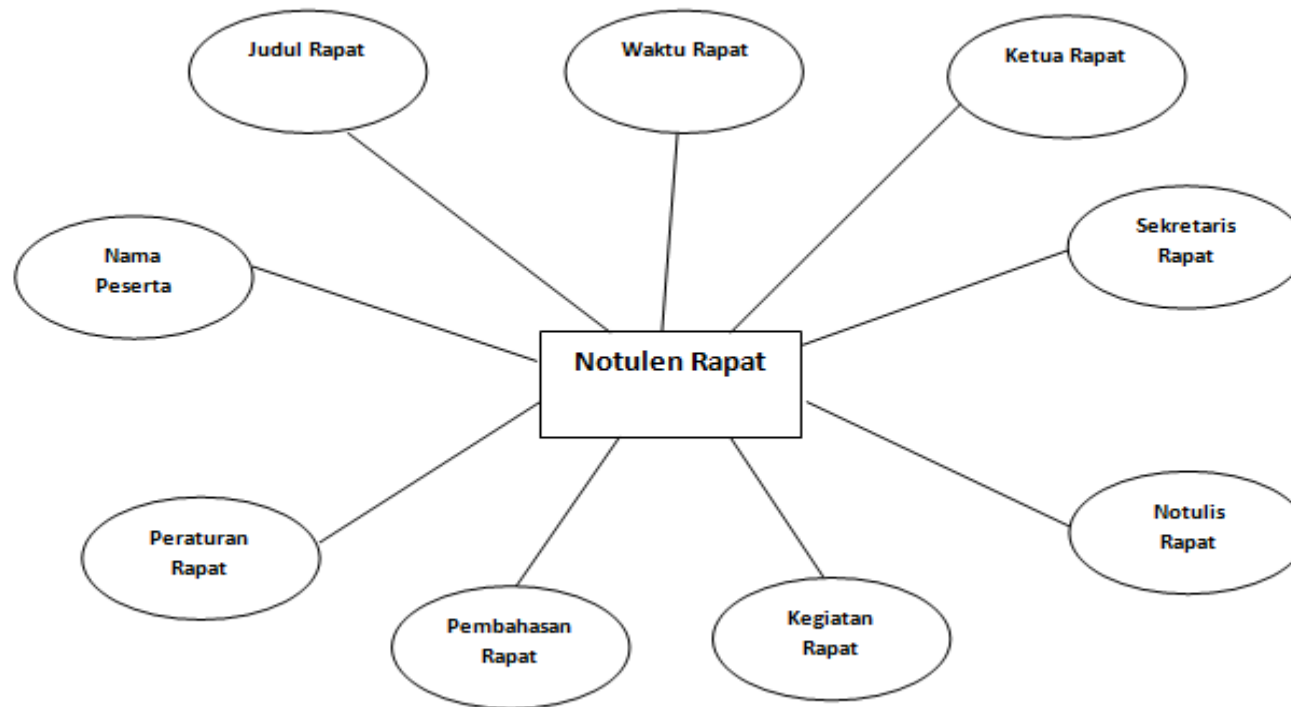
PIMPINAN SIDANG RAPAT
Kepala Dinas Kominfeksan
Pesawaran


KARYADI
Kepala Dinas
Kominfeksan
Pesawaran
NIP. 19830113 200112 1 002

DOKUMEN I/O

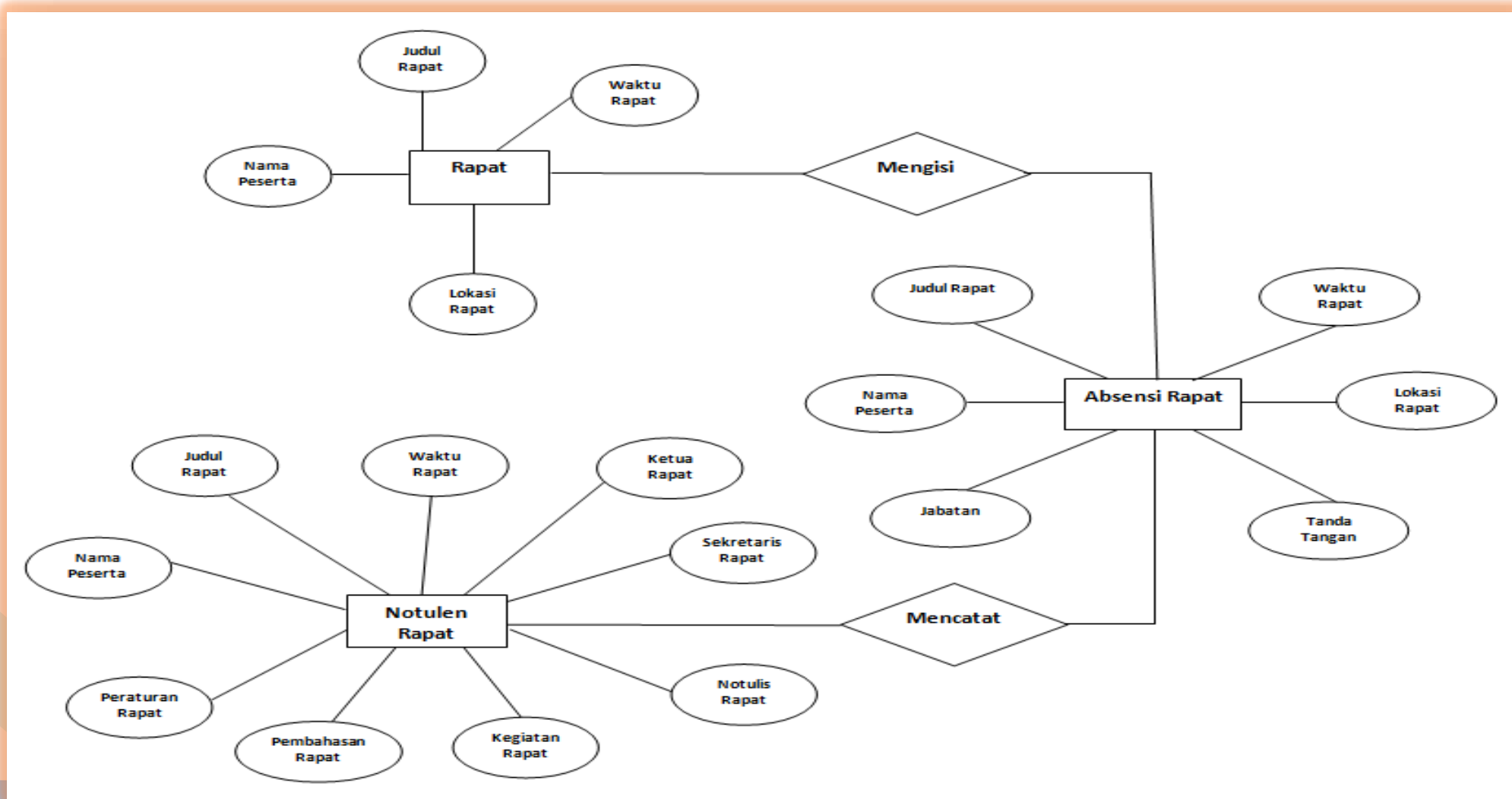
Entity Relationship Diagram (ERD)

NOTULEN RAPAT



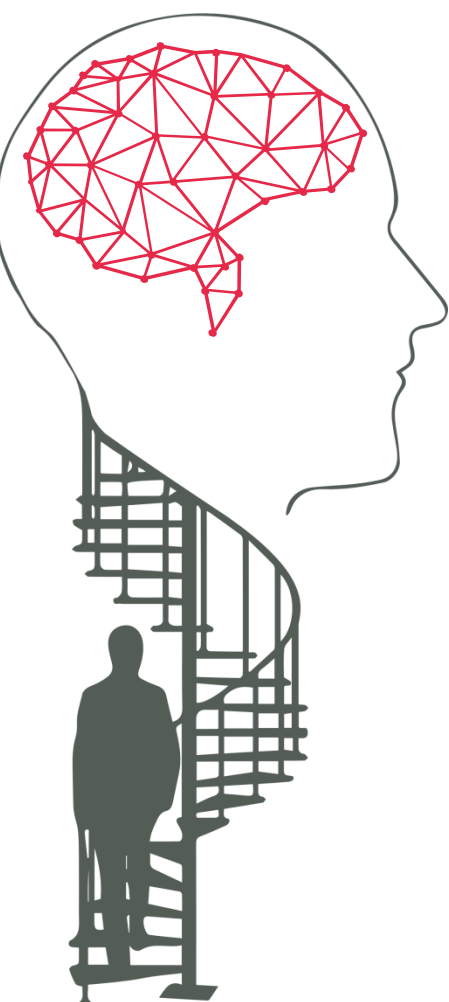
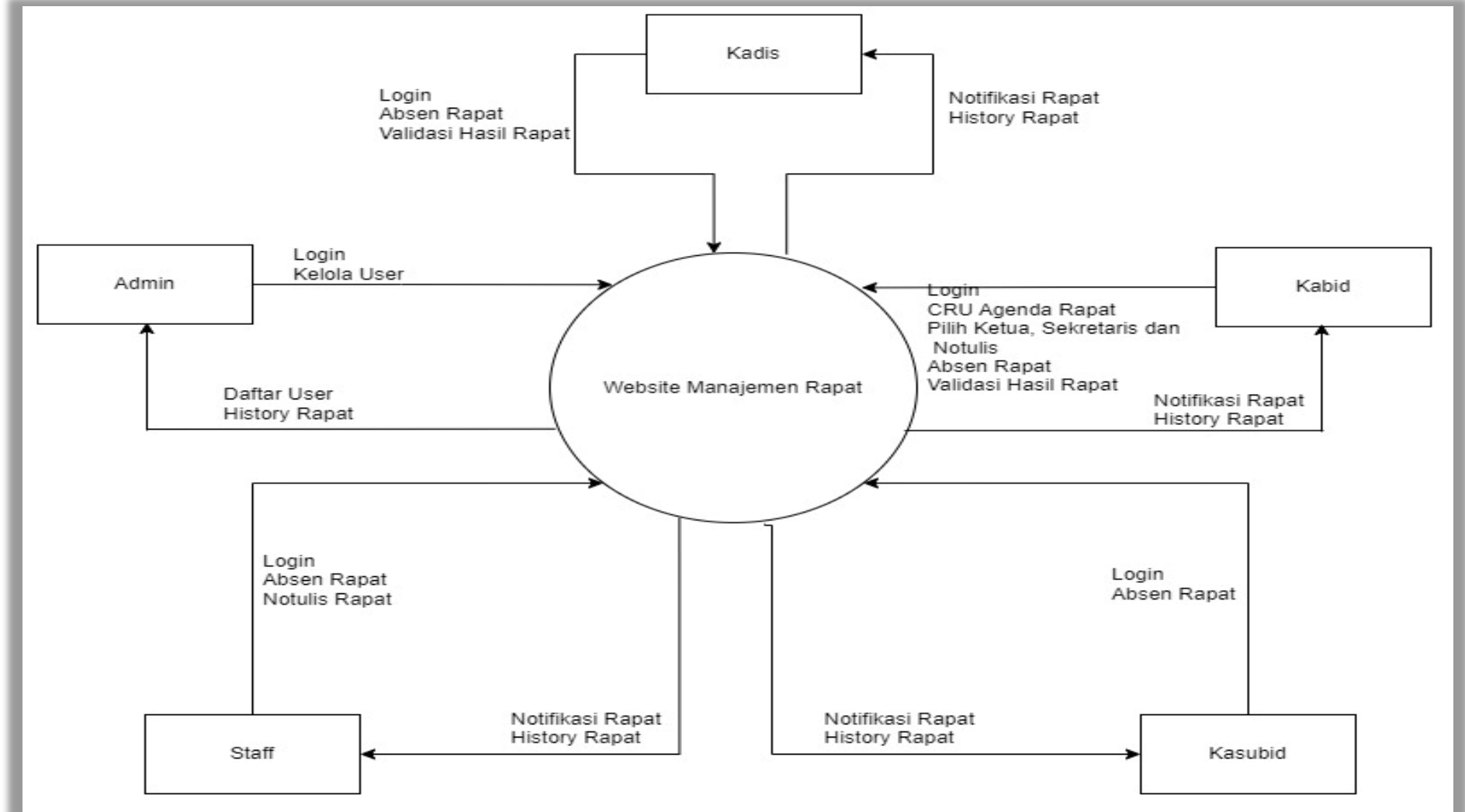
DOKUMEN I/O

Entity Relationship Diagram (ERD)



USER REQUIREMENT

BERIKUT HAL YANG BISA DILAKUKAN USER PADA SISTEM SECARA UMUM MENGGUNAKAN DIAGRAM KONTEKS



HAL YANG TIDAK BISA DILAKUKAN USER PADA SISTEM

1. Kadis, admin, staff dan kasubid tidak bisa membuat dan update rapat.
2. Kadis, admin, staff dan kasubid tidak bisa memilih ketua, sekretaris dan notulis rapat(hanya kapid yang membuat rapat yang bisa).
3. Selain admin, user yang lain tidak bisa mengelola user yang ada pada sistem.
4. Validasi rapat hanya bisa dilakukan kadis/sekdis dan kapid (jika dijadikan ketua rapat).
5. Notulen hasil rapat hanya bisa dilihat oleh peserta yang mengikuti rapat (notulen bisa dilihat di history rapat).



TERIMA KASIH

